

**FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI  
UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH  
(STUDI PADA KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2008-2012)**

**INTERGOVERNMENTAL TRANSFER AND THE FLYPAPER EFFECT-EVIDENCE  
FROM MUNICIPALITIES/REGENCIES IN BANTEN PROVINCE 2008-2012**

Ika Kartika<sup>1</sup> dan Leny Suzan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom  
<sup>1</sup>ikakartika@students.telkomuniversity.ac.id, <sup>2</sup>lenysuzan@telkomuniversity.ac.id

**Abstrak**

Gambaran kemandirian daerah dalam era otonomi tercermin dalam kemampuan daerah di bidang sumber daya keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi sumber keuangan utama Pemda. Namun ternyata peningkatan transfer Pemerintah Pusat, terutama dana alokasi umum (DAU), memicu belanja yang lebih besar daripada peningkatan pada PAD. Kondisi tersebut dinamakan fenomena *flypaper effect*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD dan DAU secara simultan maupun parsial terhadap belanja daerah. Selanjutnya dilakukan analisis apakah telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah kota/kabupaten di Provinsi Banten Tahun 2008-2012. Penelitian dilakukan terhadap 6 kabupaten dan kota yang secara konsisten menerbitkan laporan keuangan. Data dianalisis menggunakan model regresi linear berganda setelah memenuhi asumsi-asumsi ekonometrika. PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah baik secara parsial maupun secara simultan. Pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Banten.

Kata kunci: pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), belanja daerah, *flypaper effect*.

**Abstract**

~~*In the autonomy era, the local authorities' own source revenue (pendapatan asli daerah/PAD) should be the main income for local authority. But apparently, local expenditure is much more responsive to increases in the central government transfers, especially general allocation fund (dana alokasi umum/DAU), than it is to increases in the local authorities' own-source revenue. This phenomenon has come to be known as flypaper effect. This research aims to give empirical evidence on the effects of PAD and DAU, both simultaneously and partially, to the local government expenditure of municipalities/regencies in Banten Province along with flypaper effect that follows it. This empirical evidence of the presence of flypaper effect is achieved using data from 6 municipalities and regencies covering period 2008-2012. The model that was used to analyze the data or to test the hypotheses is the multiple linear regression model. Empirical result shows that PAD and DAU are simultaneously and significantly affecting the local government expenditure. Moreover, when the test was held partially, it is known that each of those factors has significant impact on the local government expenditure. The result of the analysis shows the effects of DAU on local government expenditure is greater than the effect of PAD. It indicates the existence of the flypaper effect in municipal/regency financing in Banten Province.*~~

*Keywords: local authorities' own-source revenue, general allocation fund, local government expenditure, flypaper effect.*

**1. Pendahuluan**

Kebijakan desentralisasi diterapkan di Indonesia sejak Tahun 2001 melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Penerapan desentralisasi membawa perubahan dalam pengelolaan pemerintahan di daerah dengan adanya otonomi daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hak mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah termasuk pada hak untuk mengatur sendiri keuangan daerahnya. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan kepastian pemberian dana dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, serta sumber-sumber pembiayaan.

Dana transfer atau disebut juga dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Selain dana perimbangan tersebut, pemda juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan pendanaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.

Mentayani et al. (2012) menyebutkan sejalan dengan semangat otonomi daerah, kinerja pemerintah daerah terukur melalui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Halim (2002:128) dalam Fattah dan Irman (2012), gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya di samping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata di dalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah.

Pada kenyataannya, sebagian daerah di Indonesia belum dapat memaksimalkan potensi daerahnya sehingga masih sangat bergantung pada dana perimbangan, khususnya DAU. Menurut data Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2007-2011, dana perimbangan mencapai 73% dimana sebagian besar dana perimbangan (sebesar 67%) merupakan dana alokasi umum. Terlihat bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer. Fenomena seperti ini dinamakan sebagai *flypaper effect*. Menurut Melo (2002) dalam Rokhanyah dan Nugroho (2011) *flypaper effect* adalah kondisi di mana respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah (BD) memberikan hasil telah terjadi *flypaper effect* pada beberapa daerah di Indonesia. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Listiorini (2012) pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara Tahun 2005-2010 dimana DAU memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap BD dari pada pengaruh PAD terhadap BD. Masdjojo dan Sukartono (2009) dalam penelitian pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2008 serta Analisis *Flypaper Effect* juga menghasilkan kesimpulan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif terhadap BD. Penelitian tersebut juga menghasilkan kesimpulan telah terjadi *Flypaper Effect* pada BD Provinsi Jawa Tengah karena respon BD masih lebih besar disebabkan oleh dana perimbangan khususnya yang berasal dari DAU. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pernyataan Sidik et al. (2002) dalam Listiorini (2012) bahwa pada beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD.

Namun demikian, ternyata fenomena *flypaper effect* tidak terjadi pada seluruh daerah di Indonesia. Penelitian lainnya menunjukkan tidak terjadi fenomena tersebut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mentayani et al. (2012) pada kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 yang menghasilkan kesimpulan pengaruh PAD lebih besar dari pada pengaruh DAU terhadap BD sehingga tidak terjadi *flypaper effect*.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap BD serta analisis *flypaper effect* menghasilkan berbagai kesimpulan yang berbeda. Mentayani et al. (2012) menyatakan bahwa hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lainnya, karena tiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri baik dari sisi geografis, kehidupan masyarakat maupun kondisi ekonominya. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melengkapi penelitian ini dengan mengambil objek penelitian yang berbeda yaitu pada kota dan kabupaten di Provinsi Banten.

Provinsi Banten merupakan pemerintah provinsi termuda yang terdapat di Pulau Jawa. Banten baru berdiri selama satu tahun ketika otonomi daerah diterapkan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, rasio PAD Banten terhadap total pendapatan daerah Tahun 2008-2012 sebesar 19,8%. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Banten masih rendah sekali. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pola hubungan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki pola hubungan instruktif. Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) menyatakan bahwa pola hubungan instruktif adalah pola hubungan dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Provinsi Banten yang memiliki kondisi perekonomian yang baik dilihat dari PDRB serta berbagai sumber daya alam yang dimiliki ternyata masih belum mampu mandiri dalam bidang keuangan.

Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana kondisi PAD, DAU, dan belanja daerah pada kota dan kabupaten di Provinsi Banten selama Tahun 2008-2012. Juga melihat bagaimana pengaruh antara PAD dan DAU terhadap belanja daerah baik secara simultan maupun parsial. Deskripsi kondisi PAD, DAU, dan belanja daerah dilakukan dengan mengolah data secara statistik deskriptif. Sementara untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari PAD dan DAU baik secara simultan maupun parsial dilakukan pengujian secara verifikatif untuk menguji hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji signifikansi F, uji koefisien determinasi, serta uji signifikansi t. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian kemudian dimodelkan dengan Model Regresi Linear Berganda. Uji statistika dalam penelitian ini menggunakan *software* statistika IBM SPSS 20.

## 2. Dasar Teori

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### a. Pendapatan Asli Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

### b. Dana Perimbangan

UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah atas dasar prioritas nasional dan kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah dapat berupa belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan. UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah membagi belanja menurut kelompok belanja menjadi dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, pemerintah daerah melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tercermin dalam belanja daerah. Peningkatan PAD akan meningkatkan pendapatan daerah. peningkatan dalam pendapatan daerah akan memicu peningkatan belanja daerah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Pernyataan ini didukung oleh *tax spend hypothesis* yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah (Aziz et al, 2000; Doi, 1998; Von Furstenberg et al 1986).

Selain PAD, DAU sebagai salah satu sumber penerimaan daerah tentunya berpengaruh terhadap belanja daerah. Semakin besar penerimaan DAU akan meningkatkan belanja daerah. Pernyataan ini sejalan dengan Studi Legrenzi & Milas (2001), menggunakan sampel *municipalities* di Italia, yang menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Studi Holtz-Eakin et al (1985) menemukan bahwa *grants* tahun lalu dapat memprediksi belanja tahun ini, namun sebaliknya, belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi pendapatan tahun berjalan (Prakosa, 2004).

Seharusnya pemerintah daerah dapat membiayai sebagian besar pengeluaran atau belanja daerah menggunakan pendapatan asli daerahnya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, banyak pemerintah daerah yang lebih banyak membiayai belanja daerahnya menggunakan dana transfer dari Pemerintah Pusat daripada pendapatan asli daerahnya sendiri. Kondisi pendanaan daerah yang seperti ini mendasari timbulnya fenomena *flypaper effect*.

Oates (dalam Halim, 2002) menyatakan ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri disebut *flypaper effect*. Pramuka (2010) menjelaskan *flypaper effect* dianggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan pendapatan asli daerah.

Gorodnichenko (2001) dalam Maimunah (2006) menilai bahwa fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi. Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Dari dua versi tersebut, yang paling sering terjadi adalah

fenomena *flypaper effect* versi kedua. Dimana untuk mengukur hal tersebut Melo (2002) dan Venter (2007) dalam Rokhanyah dan Nugroho (2011) menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi apabila:

- a. Pengaruh/nilai koefisien DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan.
- b. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh/respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Teknik Analisis Data

##### a. Statistika Deskriptif

Hasil pengolahan statistika deskriptif disajikan dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 Hasil Pengolahan Statistika Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	30	31804338000	839867524000	221988744866.67	202816635193.515
DAU	30	251936000000	1016902729000	615789800733.33	186423408799.836
BD	30	603630000000	2709388021000	1208182455066.67	500203908528.361
Valid N (listwise)	30				

Sumber: output SPSS

##### b. Uji Asumsi Klasik

###### 1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan *software* statistika IBM SPSS 20 didapat besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,003 dan signifikansinya pada 0,266. Nilai signifikansi tersebut diatas  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, data berdistribusi normal.

###### 2. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Hasil pengujian menggunakan matriks korelasi menunjukkan bahwa korelasi antara variabel PAD dan DAU adalah sebesar -0,341 atau sekitar 34%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius. Nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 juga menunjukkan tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

###### 3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji glejser menunjukkan probabilitas signifikansi untuk PAD dan DAU sebesar 0,090 dan 0,069. Nilai signifikansi tersebut di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

###### 4. Uji Autokorelasi

Hasil perhitungan uji Run Test menunjukkan bahwa nilai test adalah -46184312826,21533 dengan probabilitas 0,853 signifikansi pada 0,05. Signifikansi berada diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random (acak) atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

##### c. Model Regresi Linear Berganda

Model yang digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis berbentuk Model Regresi Linear Berganda (*Multiple Linear Regression Model*) menggunakan program SPSS versi 20,0. Hasil perhitungan regresi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	218081161972.602	226747781260.111		.962	.345
1 PAD	1.078	.345	.437	3.125	.004
DAU	1.219	.375	.454	3.248	.003

a. Dependent Variable: BD

Sumber: output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, maka disusunlah model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 218.081.161.972,602 + 1,078 X_1 + 1,219 X_2 + e \tag{1}$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta sebesar 218.081.161.972,602 artinya apabila nilai PAD dan DAU bernilai nol, maka diasumsikan belanja daerah akan bernilai 218.081.161.972,602 (konstan).
2. Variabel PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien 1,078 yang artinya setiap pertambahan 1% nilai PAD maka diasumsikan akan menaikkan nilai belanja daerah sebesar 1,078%.
3. Variabel DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah dengan nilai koefisien 1,219 yang artinya setiap pertambahan 1% nilai DAU maka diasumsikan akan menaikkan nilai belanja daerah sebesar 1,219%.

d. Uji Hipotesis

1. Uji Statistik F

Hipotesis yang diajukan ialah:

H0 : b1 = b2 = 0 diduga variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H1 : b1 ≠ b2 ≠ 0 diduga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 3 Uji Statistik F

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3866860610539998400000000.000	2	1933430305269999200000000.000	15.403	.000 <sup>b</sup>
	Residual	3389053942564434000000000.000	27	1255205163912753200000000.000		
	Total	7255914553104432000000000.000	29			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber: output SPSS

Dari uji ANOVA atau F test pada Tabel 3 didapat nilai F<sub>hitung</sub> sebesar 15,403 sedangkan F<sub>tabel</sub> pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) dan derajat kebebasan (df1 =2; df2 = 27) adalah sebesar 3,35. Hal ini berarti bahwa nilai F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub> (15,403 > 3,35). Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. Variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja daerah atau dapat dikatakan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.730 <sup>a</sup>	.533	.498	354288747198.207

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BD

Sumber: output SPSS

Tabel 4 menunjukkan besarnya *adjusted R*<sup>2</sup> adalah 0,498, hal ini berarti 49,8% variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari ke dua variabel independen PAD dan DAU. Sedangkan sisanya (100% - 49,8% = 50,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

### 3. Uji Statistik t

Hipotesis yang diajukan untuk pengujian ialah:

H0 :  $\beta_i = 0$ , diduga variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H1 :  $\beta_i \neq 0$ , diduga variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5 Uji Statistik t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	218081161972.602	226747781260.111	.962	.345	
	PAD	1.078	.345	.437	3.125	.004
	DAU	1.219	.375	.454	3.248	.003

a. Dependent Variable: BD

Sumber: output SPSS

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  PAD adalah sebesar 3,125 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) dan derajat kebebasan  $n-k$  ( $n =$  banyaknya observasi,  $k =$  banyaknya variabel) atau  $40-3 = 27$  ( $df = 27$ ) pada pengujian dua arah adalah sebesar 2,052. Hal ini berarti bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,125 > 2,052$ ). Maka PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan untuk nilai  $t_{hitung}$  DAU adalah sebesar 3,248. Hal ini berarti bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,248 > 2,052$ ). Maka DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

### 3.2 Pembahasan

Hasil uji signifikansi F bahwa secara bersama-sama PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Banten. Semakin besar nilai PAD dan DAU maka akan semakin besar pula nilai belanja daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yaitu PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kota/kabupaten di Provinsi Banten dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Mentayani et al (2012), Masdjojo dan Sukartono (2009), Listiorini (2012), Prakosa (2004) bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil uji signifikansi t menunjukkan PAD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Artinya semakin besar PAD maka belanja daerah akan semakin besar pula. Hal ini sejalan dengan pernyataan *tax spend hypothesis* bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua yakni PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kota/kabupaten di Provinsi Banten dapat diterima. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Mentayani et al (2012), Masdjojo dan Sukartono (2009), Listiorini (2012), Prakosa (2004) yakni pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil uji signifikansi t juga menunjukkan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Artinya semakin besar nilai penerimaan DAU maka akan semakin besar pula nilai pengeluaran belanja daerah. Hal ini sejalan dengan hasil studi Legrenzi dan Milas (2001) bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga yakni DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kota/kabupaten di Provinsi Banten dapat diterima. Maka DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Mentayani et al (2012), Masdjojo dan Sukartono (2009), Listiorini (2012), Prakosa (2004) yakni dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, untuk melihat apakah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah di Provinsi Banten dapat dibandingkan koefisien PAD terhadap belanja daerah dengan koefisien DAU terhadap belanja daerah.

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang tampak pada Tabel 2 menunjukkan besarnya nilai koefisien dari PAD dan DAU terhadap belanja daerah. Didapat nilai koefisien PAD terhadap belanja daerah sebesar 1,078 sedangkan nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah sebesar 1,219. Hal ini menunjukkan pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap

belanja daerah. Karena nilai koefisien pengaruh DAU lebih besar dari nilai koefisien pengaruh PAD berarti telah terjadi *flypaper effect* pada keuangan daerah pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2008-2012.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1 Kesimpulan

Uji signifikansi simultan menunjukkan bahwa variabel independen PAD dan DAU secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten. Sementara uji signifikansi parsial (individual) menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten. Hasil analisis terhadap *flypaper effect* menunjukkan nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien PAD terhadap belanja daerah sehingga dapat disimpulkan telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Banten.

##### 4.2 Saran

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan memasukkan aspek lain ke dalam penelitian seperti aspek kebijakan publik, luas wilayah, serta manajemen keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas sampel penelitian untuk seluruh Wilayah Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang.

Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan sumber penerimaan dari pajak dan retribusi yang cukup potensial. Selain itu juga menggali potensi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sumber penerimaan dari daerahnya sendiri yakni PAD sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada transfer Pemerintah Pusat.

#### Daftar Pustaka:

- [1] Fattah, S. dan Irman (2012). *Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada Era Otonomi Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 1—8.
- [2] Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN.
- [3] Halim, Abdul. (2002). *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat.
- [4] Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2012). *Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Banten*. [online]. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/25728.%20BANTEN> [26 September 2014]
- [5] Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [6] Listiorini. (2012). *Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol.4 No.2. 111—126.
- [7] Maimunah, M. (2006). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi, K-ASPP 04. 1—27.
- [8] Masdjojo, Gregorius N., dan Sukartono. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008*. Telaah Manajemen, Vol.6 Edisi 1. 1—15.
- [9] Mentayani, I., Nurul H., dan Rusmanto. (2005). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Spread - April 2012, Volume 2 No. 1. 55—64.
- [10] Prakosa, B. K. (2004). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY*. JAAI Vo. 8 No. 2. 101—118.
- [11] Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [23 September 2014]
- [12] Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. [26 September 2014]

- [13] Rokhaniyah, S., Nugroho, dan Rudi, M. (2011). *Analisis Flypaper Effect pada Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Tahun 2006-2008*. Fokus Ekonomi, Vol.10 No.2.